

Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat di Desa Parerejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu

Zahrohtun Haniah¹, Selly Puspita Sari²

Fakultas Sosial dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Aisyah Pringsewu^{1,2}
e-mail: zahrohtunh@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Parerejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Ada sebagian masyarakat yang menentang alokasi dan penggunaan dana desa, terutama karena kurangnya informasi dan keterlibatan warga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari survei terhadap 98 responden yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan menggunakan SPSS. Temuan penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas mempunyai dampak yang signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat, baik secara positif maupun negatif. Akuntabilitas menunjukkan tanggung jawab aparat desa dalam memastikan penggunaan anggaran tepat dan dapat ditanggungjawabkan, sedangkan transparansi menjamin keakuratan informasi yang diberikan kepada masyarakat. Ketika tingkat transparansi dan akuntabilitas meningkat, kepercayaan masyarakat terhadap infrastruktur daerah juga meningkat. Semua ini menekankan betapa pentingnya menerapkan prinsip tata kelola yang baik dalam pelaksanaan dana desa guna meningkatkan partisipasi masyarakat, kepercayaan masyarakat, dan legitimasi pemerintah daerah di tingkat sosial.

Kata kunci : akuntabilitas; transparansi; kepercayaan masyarakat.

ABSTRACT

The aim of this study is to examine the influence of transparency and accountability in village governance on community trust in Parerejo Village, Gadingrejo District, Pringsewu Regency. Some members of the community have opposed the allocation and use of village funds, primarily due to a lack of information and citizen involvement. This research uses a quantitative approach with primary data obtained from a survey of 98 respondents selected through purposive sampling. The analytical technique employed is SPSS. The research findings indicate that transparency and accountability have a significant impact on the level of public trust, both positively and negatively. Accountability reflects the responsibility of village officials in ensuring that budget usage is accurate and justifiable, while transparency ensures the accuracy of information provided to the community. When the levels of transparency and accountability increase, public trust in local infrastructure also rises. All of these findings emphasize the importance of applying good governance principles in the implementation of village funds to enhance community participation, public trust, and the legitimacy of local government at the social level.

Keywords : *accountability; transparency; public trust.*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penyelenggara negara cenderung menurun. Bahkan, beberapa pihak berpendapat bahwa keberadaan pemerintahan sudah tidak lagi diperlukan (Daniprawiro, 2013). Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kesenjangan antara ekspektasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan realitas kinerja pemerintah yang sebenarnya

(Nye et al., 1997). Menurut Grosso dan Gregg (2011), salah satu cara untuk meningkatkan kepuasan masyarakat adalah dengan menyediakan informasi yang mereka butuhkan, yang dapat diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan dan kinerja pemerintah.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan diperuntukkan bagi desa. Dana ini dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Suryanto, 2014). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 mengenai Dana Desa, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, diterbitkan sebagai pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Alokasi Dana Desa ditentukan oleh jumlah desa dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografis.

Penerapan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) diperlukan untuk penyelenggaraan dan penyelenggaraan daerah. Akuntabilitas adalah prinsip pertama tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntabilitas merupakan tanggung jawab wujud dalam pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang diungkapkan melalui pendekatan tanggung jawab yang metodis. Oleh karena itu, akuntabilitas pemerintah sangat penting sebagai salah satu faktor penentu otonomi suatu daerah agar dapat berjalan secara efektif dan optimal.

Selain akuntabilitas, transparansi juga menjadi faktor penting dalam memastikan pemerintahan dijalankan secara efektif. Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dunia usaha yang menganut konsep Good Governance. Kedua aspek ini memastikan operasional pemerintahan berjalan lancar, dapat dipahami, dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat. Transparansi diartikan sebagai kemampuan pemerintah untuk berkomunikasi dengan masyarakat mengenai kebijakan, peraturan, program, anggaran, dan kegiatan. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat mengakses informasi yang relevan sehingga dapat berpartisipasi dalam pengawasan serta pengambilan keputusan. (Sulistiyani, 2004).

Penelitian sebelumnya oleh Safirah, at., al., (2024) dan Irna, (2020) menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Studi Riyan & Rizal, (2024) menginformasikan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kepercayaan dan kepuasan masyarakat. Namun, hasil berbeda yang dikemukakan oleh Eni & Enita, (2020) serta Riyan & Rizal, (2024) menemukan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kepercayaan dan kepuasan masyarakat. Studi yang dilakukan oleh Intan, at., al., (2023) menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Dengan adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh

akuntabilitas dan transparansi mendorong peneliti untuk melakukan uji ulang guna memperoleh bukti empiris yang lebih konsisten terkait pengelolaan danadesa.

Keputusan Kepala Administrasi Lembaga Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi landasan bagi peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006, yang mengatur Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kemudian diperkenalkan oleh LAKIP. Peraturan ini menyatakan bahwa transparansi dan akuntabel keuangan daerah pengelolaan sangat penting untuk menjamin tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pemerintahan.

Tata kelola yang baik pada dasarnya adalah pendekatan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membangun praktik bisnis yang sehat, meningkatkan daya berkelanjutan, dan mengurangi penyimpangan. Salah satu indikasi tata kelola pemerintahan yang baik adalah adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pemerintah sehingga melemahkan akuntabilitasnya. Sebagai wujud tata kelola yang baik, pemerintah daerah harus menjamin akuntabilitas pelayanan publik dan melaksanakannya secara transparan, khususnya dalam pengelolaan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Eni Dwi Susliyanti, 2020).

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh akuntabilitas dan dana desa terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Parerejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan pada tahun 2024 oleh Safirah Andayani, Ilham Zitri, dan Darmansyah. Salah satu faktor yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini dilakukan di Desa Parerejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di Kelurahan Punia Kota Mataram NTB.

Menurut penelitian yang dilakukan Sofyani dan Tahar (2021) di 30 desa Bantul, akuntabilitas tidak berdampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat. Hasil tersebut berdasarkan penelitian yang dilakukan Sofyani dkk. (2022) yang meneliti 128 desa di Sleman, Bantul, Gunung Kidul, dan Kulon Progo. Sebaliknya, Aprilia (2019) mencatat bahwa akuntabilitas berdampak positif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap Kecamatan

Lingsar, Lombok Barat. Laporan keuangan dipandang sebagai bentuk tanggung jawab perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, menurut teori stewardship (Laka, 2020). Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Akuntabilitas pemerintah desa berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat.

Menurut penelitian Sofyani dan Tahar (2021) dan Sofyani dkk. (2022), transparansi pada pemerintah daerah berdampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat. Namun berbeda dengan Aprilia (2019), data Kecamatan Lingsar menunjukkan bahwa transparansi tidak berdampak negatif terhadap kepercayaan publik. Berdasarkan teori stewardship, pemerintah daerah diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, serta merencanakan dan melaksanakan anggaran yang mungkin timbul (Laka, 2020). Pemerintah desa harus menyediakan informasi keuangan yang akurat guna menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Berdasarkan penelitian dan teori sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

H2: Transparansi pemerintah desa berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kuantitatif, berdasarkan aspek tematik seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan nilai penelitian, dengan tujuan untuk memahami dampak transparansi dan akuntabilitas di daerah terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan Sugiyono (2017), proses penelitian ini menggunakan data awal yang diperoleh langsung dari objek penelitian di lapangan. Lokasi pada penelitian ini dilakukan di Pekon Parerejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, sebagaimana telah dijelaskan di latar belakang sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Pekon Parerejo yang berjumlah 5.832 jiwa (BKKBN, 2024). Proses pemilihan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan dengan umpan balik tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat Pekon Parerejo yang

berusia 15 sampai 64 tahun atau berjumlah 2.540 jiwa. Banyaknya sampel dari populasi dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin agar diperoleh hasil yang representatif. Berdasarkan hasil penelitian, diambil sampel sebanyak 96 orang. Data kemudian dianalisis menggunakan kuesioner sebagai alat penelitian dengan skala Likert 4 poin.

Analisis data dilakukan setelah proses pengumpulan informasi dari responden dan sumber lainnya. Penelitian ini menggunakan tiga teknik analisis—validitas, reliabilitas, dan pengujian hipotesis—untuk memahami dampak transparansi dan akuntabilitas terhadap kepercayaan masyarakat di Pekon Parerejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Definisi variabel operasional ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1 Operasional Variabel dan Indikatornya

Variabel	Indikator	Referensi
Akuntabilitas Pemerintah Desa	1. Banyak transaksi berkaitan dengan penggunaan uang desa tidak disertai bukti transaksi yang sah (terotorisasi).	Sofyani dan Tahar (2021)
	2. Format pelaporan keuangan pemerintah desa tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh aturan yang berlaku.	
	3. Laporan keuangan yang disusun pemerintah desa dibuat secara lengkap.	
	4. Laporan keuangan pemerintah desa selalu diselesaikan dengan tepat waktu.	
	5. Kegiatan yang dilakukan pemerintah desa tidak sesuai dengan perencanaan anggaran dan belanja desa (APBDes) yang telah ditetapkan.	
Transparansi Pemerintah Desa	1. Pemerintah desa secara berkala melaporkan informasi tentang perolehan dan penggunaan uang desa (APBDes).	Sofyani dan Tahar (2021)
	2. Pemerintah desa secara berkala melaporkan informasi tentang kegiatan desa yang telah dilaksanakan.	
	3. Pemerintah desa secara berkala	

	melaporkan informasi tentang capaian prestasi desa yang telah diraih.	
Kepercayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah desa bekerja secara amanah (dapat dipercaya). 2. Pemerintah desa bekerja untuk kepentingan rakyat. 3. Masyarakat aktif berpartisipasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa. 4. Masyarakat patuh terhadap himbauan dari pemerintah desa. 	Sofyani dan Tahar (2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam analisis mengikuti distribusi normal. Jika nilai probabilitas (p-value) lebih dari 0,05 maka data dianggap normal. Sebaliknya, jika nilai p kurang dari 0,05 maka data tersebut tidak signifikan secara statistik dan tidak mengikuti distribusi normal.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

	Kolmogorov-Smirnov Z	Probabilitas
Model regresi	0.145	0.032

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai Z sebesar 0,145 dan p-value sebesar 0,032. Nilai p yang kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa data tidak mendukung asumsi normalitas. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi residu dalam model regresi tidak mengikuti distribusi normal secara signifikan. Oleh karena itu, analisis selanjutnya harus menggunakan metode statistik yang tidak mengkonfirmasi normalitas data atau mengubah data sehingga asumsi normalitas menjadi berkurang.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk mendeteksi tingginya korelasi antar variabel independen dalam suatu model regresi. Multikolinearitas yang berlebihan dapat menyebabkan ketidakstabilan estimasi koefisien regresi sehingga dapat mempengaruhi keakuratan interpretasi model. Salah satu indikator umum yang digunakan adalah Variance Inflation Factor (VIF) yang nilainya di atas 10

menunjukkan adanya multikolinearitas yang signifikan.

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF
Kompetensi	1.660
Moral reasoning	1.660

Berdasarkan hasil analisis multikolinear, Variance Inflation Factor (VIF) untuk variabel Moral Reasoning dan Competence adalah sekitar 1,660. Nilai VIF yang ini berada di bawah nilai kritis ke-10 menunjukkan tidak adanya multikolinearitas yang signifikan antar variabel independen dalam model regresi. Dengan cara ini, kedua variabel dapat digunakan bersama-sama dalam analisis tanpa mempengaruhi stabilitas estimasi koefisien regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari uji heteroskedastisitas adalah untuk mengetahui apakah terdapat variasi ketidaksamaan residual dalam model regresi. Dalam model regresi yang baik, residualnya harus mempunyai variabel yang konsisten atau homoskedastis. Ketika terjadi heteroskedastisitas, asumsi regresi klasik menjadi rusak dan dapat mengakibatkan estimasi menjadi kurang efisien. Uji yang umum digunakan antara lain uji Glejser, Breusch-Pagan, dan White. Jika tingkat signifikansi (p-value) lebih dari 0,05 maka model dianggap berdasarkan heteroskedastisitas.

Tabel. 4 Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.
Kompetensi	0.000
Moral Reasoning	0.000

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas diperoleh koefisien signifikansi variabel kompetensi dan penalaran moral berkisar pada 0,0001. Karena tingkat signifikansi tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model tersebut termasuk heteroskedastisitas. Misalnya varians residual tidak konstan (tidak homoskedastis), sehingga model regresi tidak sepenuhnya memenuhi asumsi klasik. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan perbaikan model, seperti transformasi data atau menggunakan metode regresi yang kuat untuk mendapatkan estimasi yang lebih akurat.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi (R²) digunakan untuk menggambarkan kemampuan beberapa

variabel independen yang signifikan dalam menggambarkan variabel dependen dalam model regresi yang diberikan. Nilai R² didasarkan pada skala 0 sampai 1, dimana nilai 1 menunjukkan bahwa model semakin baik dalam menjelaskan variabel terikat. Sebaliknya, nilai 0 menunjukkan bahwa variabel independen hanya mengungkapkan sebagian kecil variasi yang terjadi pada variabel dependen. Meskipun R² yang tinggi menunjukkan model yang baik, namun tidak membuktikan bahwa model tersebut didasarkan pada asumsi regresi klasik.

Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi

	Nilai
R Square	0,422

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R Square sebesar 0,422. Artinya sebesar 42,2% variasi kepercayaan masyarakat dapat dijelaskan oleh variabel independen transparansi dan akuntabilitas. Sebaliknya, 57,8% sisanya dipengaruhi oleh faktor diluar model penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas mempunyai peran yang signifikan dalam menumbuhkan kepercayaan publik, meskipun ada faktor eksternal lain yang juga berperan.

Uji Signifikansi Simultan

Uji signifikansi simultan disebut juga Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebas dalam suatu model regresi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Penelitian ini menguji hipotesis nol (H_0) yang menyatakan bahwa seluruh koefisien regresi sama dengan nol (tidak berbeda nyata). Jika tingkat signifikansi (p-value) kurang dari 0,05, maka H_0 dievaluasi, yang menunjukkan model regresi simultan yang signifikan. Dengan kata lain variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 5. Uji Signifikansi Simultan

	F statistics	Probabilitas
Model Regresi	71.953	0.000

Berdasarkan hasil uji signifikansi simultan (uji F), diperoleh nilai statistik F sebesar 71,953, dan nilai probabilitas nol ribu. Karena probabilitasnya lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut signifikan secara simultan. Dengan demikian, variabel transparansi dan akuntabilitas secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan

terhadap kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, model regresi yang sering digunakan untuk menggambarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis

Tabel 6. Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Coef.	T	Sig.
(Constant)	3.360	2.293	0.024
Akunt	0.486	3.957	0.000
Trans	0.536	5.826	0.000
F-Value	65,289		0.000
R ²	0.570		

Tabel 7. Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

	Pernyataan Hipotesis	Hasil
H1	Akuntabilitas pemerintah desa berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat	Diterima
H2	Transparansi pemerintah desa berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat	Diterima

PEMBAHASAN

Pengaruh Akuntabilitas Pemerintah Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat

Berdasarkan temuan penelitian disimpulkan bahwa akuntabilitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menyatakan bahwa akuntabilitas dapat mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi guna menumbuhkan kepercayaan. Selain itu, penelitian Fadilah dan Hidayat (2023) serta Putri dan Santoso (2020) mendukung hal tersebut dengan menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam kerja organisasi publik secara signifikan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Pengaruh Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat

Temuan penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian Wulandari dan Rahmawati (2022) yang menyatakan bahwa kecukupan informasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan mengurangi intimidasi dalam komunikasi organisasi. Selain itu, teori kepercayaan menegaskan bahwa transparansi merupakan

komponen penting dalam membangun dan meningkatkan kepercayaan (Mayer, Davis, & Schoorman, 1995). Penelitian oleh Saputra dkk. (2021) juga menunjukkan bahwa transparansi dalam pelayanan publik meningkatkan persepsi positif masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi menjadi lebih kuat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dana desa berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat lokal di Desa Parerejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh aparatur daerah, maka semakin meningkat pula kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan pengelolaan keuangan daerah. Kedua variabel ini sangat menentukan tata kelola desa yang baik, jujur, dan tegas.

Keterbatasan penelitian ini adalah hanya dilakukan di satu daerah dengan jumlah responden yang sangat sedikit; akibatnya, hasilnya tidak dapat diekstrapolasi ke bidang lain. Oleh karena itu, langkah penelitian selanjutnya adalah memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi dan lebih banyak responden dari kabupaten lain dapat memberikan hasil yang lebih representatif dan komprehensif. Selain itu, variabel lain seperti partisipasi masyarakat dan kualitas pelayanan publik juga dapat digunakan untuk menganalisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, N. (2019). *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kepercayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 115–123.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2024). *Data Kependudukan Desa Parerejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Tahun 2024*. Diakses dari <https://www.bkkbn.go.id>
- Daniprawiro, M. (2013). *Membangun Kepercayaan Publik Melalui Akuntabilitas Pemerintahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Eni, & Enita. (2020). *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kepercayaan dan Kepuasan Masyarakat*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 45–56.
- Fadilah, R., & Hidayat, T. (2023). *Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kepercayaan Masyarakat pada Instansi Pemerintah*. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 45–53.
- Grosso, N., & Gregg, B. (2011). Public trust and government transparency: The role of information. *Journal of Public Administration*, 22(3), 234–248.
- Intan, R., Andriani, D., & Supriyadi, A. (2023). *Analisis Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa*. *Jurnal Akuntansi Publik*, 10(1), 56–65.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Diakses dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46215/inpres-no-7-tahun-1999>
- Irna, N. (2020). *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kepercayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(1), 89–97.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Diakses dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/104927/keputusan-kepala-lan-no-239ix68tahun-2003>
- Laka, H. (2020). *Teori Stewardship dalam Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Nye, J. S., Zelikow, P. D., & King, D. C. (1997). *Why People Don't Trust Government*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Putri, N. M., & Santoso, A. (2020). Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa serta Pengaruhnya terhadap Kepercayaan Masyarakat. *Jurnal Manajemen Publik*, 8(2), 101–110.
- Riyan, A., & Rizal, M. (2024). *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa terhadap Kepuasan Masyarakat*. *Jurnal Akuntansi Desa*, 9(2), 70–82.
- Safirah, A., Zitri, I., & Darmansyah. (2024). *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kepercayaan Masyarakat di Kelurahan Punia Kota Mataram*. *Jurnal*

- Akuntansi dan Kebijakan Publik, 6(1), 101–112.
- Saputra, D., Ramadhan, F., & Iskandar, B. (2021). Peran Transparansi dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat pada Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 15(3), 233-242.
- Sofyani, H., & Tahar, A. (2021). Apakah akuntabilitas dan transparansi mempengaruhi kepercayaan publik? Studi pada pemerintah desa di Bantul. *Jurnal Akuntabilitas*, 14(2), 150–165.
- Sofyani, H., Puspita, D., & Arfianto, A. (2022). Pengaruh good governance terhadap kepercayaan masyarakat di pemerintah desa: Studi empiris di DIY. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 8(1), 44–58.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, A. (2004). *Good Governance: Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif dan Terpercaya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Suryanto, H. (2014). *Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Diakses dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38701/uu-no-6-tahun-2014>
- Wulandari, S., & Rahmawati, D. (2022). Transparansi dan Kepercayaan Masyarakat di Era Digital. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 10(2), 77-85.